

TESIS

**IMPLEMENTASI PERSYARATAN DASAR PADA
PROSES PEMEKARAN KECAMATAN HALONG**



**Diajukan Oleh :
YUSNITA
NIM. 2220215320063**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**IMPLEMENTASI PERSYARATAN DASAR PADA PROSES
PEMEKARAN KECAMATAN HALONG**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

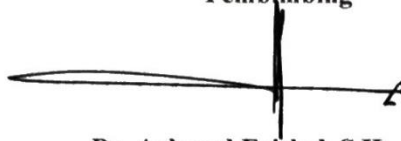
**Oleh
YUSNITA
NIM. 2220215320063**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : Implementasi Persyaratan Dasar Pada Proses Pemekaran Kecamatan Halong
Nama : Yusnita
NIM : 2220215320063

**Disetujui,
Pembimbing**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

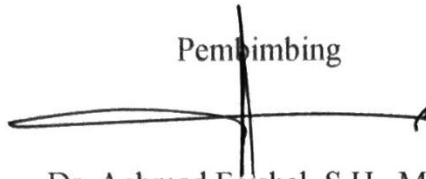

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

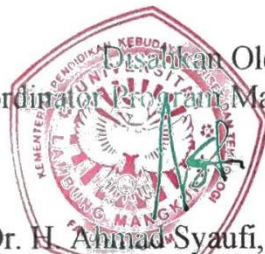
Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal :

Pembimbing



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Disetujui Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. N. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal : 05 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Suprpto, S.H.,M.H.
Sekretaris	: Dr. Anang Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.
Anggota	: Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusnita

NIM : 2220215320063

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Yusnita

NIM. 2220215320063

YUSNITA. 2024. IMPLEMENTASI PERSYARATAN DASAR PADA PROSES PEMEKARAN KECAMATAN HALONG. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 109 Halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini membahas implementasi persyaratan dasar pemekaran kecamatan di Indonesia, dengan fokus pada rencana pemekaran Kecamatan Halong di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota untuk membentuk kecamatan. Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang secara khusus mengatur persyaratan pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian kecamatan. Salah satu daerah yang berencana melakukan pemekaran kecamatan adalah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dengan rencana pemekaran Kecamatan Halong. Kecamatan Halong memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Balangan dan jumlah penduduk terbanyak, sehingga perlu dibentuk Kecamatan baru hasil pemekaran yaitu "Kecamatan Uren" untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan rencana pemekaran kecamatan tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Penelitian ini berfokus pada implementasi persyaratan dasar pemekaran kecamatan pada proses pemekaran Kecamatan Halong.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi persyaratan dasar pada proses pemekaran Kecamatan Halong. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan persyaratan dasar dan mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan aturan terkait persyaratan pemekaran kecamatan, serta mengidentifikasi kelemahan atau kendala yang perlu diperbaiki dalam regulasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris (*socio-legal research*) Penelitian hukum yuridis menggunakan data pustaka sebagai sumber sekunder; penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum empiris, adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari aktivitas masyarakat melalui penelitian lapangan. yang tujuannya adalah untuk mendapatkan deskripsi lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu. Berdasarkan penjelasan

sebelumnya, tipe penelitian yang paling tepat untuk penelitian empiris normatif adalah tipe penelitian preskriptif (prescriptive research). Alasan utamanya adalah karena penelitian empiris normatif memiliki tujuan utama untuk merumuskan norma, standar, pedoman, atau rekomendasi yang seharusnya berlaku dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Sifat preskriptif ini menjadi ciri khas dari penelitian empiris normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif sehingga diperoleh solusi yang tepat. Kemudian bahan hukum tersebut diolah dengan membagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Implementasi ketentuan pemekaran wilayah secara umum termuat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana dalam peraturan ini mengatur prinsip-prinsip umum pemerintahan daerah termasuk pembentukan kecamatan. Sedangkan dalam PP No. 17 Tahun 2018 memberikan landasan hukum yang jelas dan terperinci mengenai proses pemekaran kecamatan, termasuk Kecamatan Halong di Kabupaten Balangan. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan kecamatan dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Implementasi ketentuan persyaratan pemekaran kecamatan ini terhadap proses pemekaran Kecamatan Halong harus memperhatikan kondisi spesifik daerah dan memastikan pemenuhan semua persyaratan yang ditetapkan.

Hambatan dalam penerapan ketentuan persyaratan dasar dalam proses pemekaran kecamatan Halong menghadapi serangkaian kendala yang saling terkait dan kompleks, melibatkan aspek kewilayahan, aspek administratif dan prosedural serta keadaan sosial politik dalam Masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada memerlukan pendekatan yang komprehensif, adaptif dan partisipatif yang memerlukan sinergi dari pemerintah pusat, daerah dan Masyarakat untuk memastikan bahwa proses pemekaran tidak hanya membawa manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Halong.

YUSNITA. 2024. "Implementation of Basic Requirements in the Expansion Process of Halong District". Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Supervisor : **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** 109 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Sub-district expansion; Policy implementation; Basic requirements; Halong District;

This research focuses on the process of expansion of Halong District in Balangan Regency, South Kalimantan, and how the basic requirements for sub-district expansion are regulated in Article 4 Number (1) of Government Regulation Number 17 of 2018 are implemented.

The purpose of this study is to see whether the expansion process of Halong District is in accordance with applicable regulations and to find out the factors that affect the implementation of the policy. Descriptive qualitative research is used to collect data through interviews, observations, and reviewing documents.

The results show that the expansion process of Halong District has met most of the basic requirements set, but there are some problems in carrying out the process, especially related to demographics and the availability of facilities. In addition, this study shows that community participation and coordination between stakeholders are very important in the formation of effective sub-district expansion. It is hoped that these findings will help evaluate and refine Indonesia's territorial expansion policy.

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP

الحمد لله رب العالمين

KU PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG
YANG PALING KU SAYANGI.

Mama dan Abah tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Mama dan Abah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga dengan pencapaian ini menjadi salah satu alasan kalian berbahagia tentangku.

Tesis ini juga kupersembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidupku yang selalu mendukung dan mendoakan, Suamiku, anak-anakku dan Saudaraku yang selalu menjadi penyemangat dan motivasiku untuk terus menjadi lebih baik,

*Ku ucapkan terima kasih tak terhingga
Untuk doa dan dukungannya selama ini hingga selesainya tesis ini.*

***“Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah fatal: yang terpenting adalah keberanian untuk melanjutkan.”
(Winston Churchill)***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UCAPAN TERIMA KASIH

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan salawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul “IMPLEMENTASI PERSYARATAN DASAR PADA PROSES PEMEKARAN KECAMATAN HALONG” Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda, Suami, Anak-anak, serta saudara penulis yang selalu memberikan do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan, selaku pimpinan OPD dimana penulis mengabdikan menjalankan tugas, yang telah memberikan persetujuan, dan kesempatan kepada Penulis untuk dapat melanjutkan Pendidikan di Magister Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Bapak Jaya, dan Bapak Agus, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Sahabat dan teman-teman Penulis terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan.
9. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas Hukum Tata Negara terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.
10. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Aamiin Yaa Rabbal Allamin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Banjarmasin, Juli 2024

Hormat Penulis,

Yusnita, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN TESIS	
ABSTRAK	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR / GRAFIK	

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 10
	C. Keaslian Penelitian 10
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
	E. Tinjauan Pustaka 14
	F. Metode Penelitian 48
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 54
BAB II	IMPLEMENTASI KETENTUAN PERSYARATAN DASAR PADA PROSES PEMEKARAN KECAMATAN HALONG
	A. Landasan Hukum Pembentukan Kecamatan Baru 56
	B. Persyaratan Pembentukan Kecamatan Baru 70
	C. Proses Pembentukan Kecamatan Baru 89
BAB III	HAMBATAN DALAM PENERAPAN KETENTUAN PERSYARATAN DASAR PEMEKARAN KECAMATAN
	A. Kendala Persyaratan Dasar Kewilayahan 93
	B. Kendala Administratif dan Prosedural 102
	C. Kendala Sosial dan Politik 103
BAB IV	PENUTUP
	A. KESIMPULAN 108
	B. SARAN 109
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Yang Akan di Bentuk	71
2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Induk (Halong)	72
2.3 Fasilitas Kesehatan Kecamatan Yang Akan Di Bentuk	80
2.4 Fasilitas Kesehatan Kecamatan Induk (Halong)	80
2.6 Fasilitas Pendidikan Kecamatan Yang Akan Di Bentuk	81
2.7 Fasilitas Pendidikan Kecamatan Induk (Halong)	82
2.8 Fasilitas Peribadatan Kecamatan Yang Akan Di Bentuk	83
2.9 Fasilitas Peribadatan Kecamatan Yang Akan Di Bentuk	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1	Kondisi Infrastruktur Jalan Menuju Kecamatan Halong dari Desa Uren 5
2.1	Peta Administratif Kecamatan Halong 75
2.2	Luas Total Area (Km ²) Kecamatan Halong berdasarkan Desa 76
2.3	Focus Group Discussion Peneliti Bersama Para Kepala Desa Di Wilayah Kecamatan yang Akan Di Bentuk 85
2.4	Peserta Focus Group Discussion Di Wilayah Kecamatan yang Akan Di Bentuk 86
3.1	Peta Kawasan Hulu dan Kawasan Hilir Terkait Perkembangan Pemekaran Kecamatan Halong 100